

**HAMBATAN MALTA MENCAPAI TARGET ENERGI TERBARUKAN DALAM
KERANGKA *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE* UNI EROPA PERIODE 1st
INTERIM 2010-2014**

Mar'atus Sholikha
Departemen Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
E-mail: maratus9708@gmail.com

Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan pemerintah Malta yang memilih impor minyak lebih dari 100 persen setiap tahunnya sedangkan negara tersebut sedang menerapkan kerangka EU Directive 2009/28/EC dimana salah satu isi kerangka tersebut menekankan setiap negara anggota EU harus mengurangi jumlah impor minyak untuk mencapai target energi terbarukan. Peneliti memilih negara Malta untuk dikaji tentang implementasi kebijakan Renewable Energi Directive 2009/28/EC (RED) dalam usahanya untuk menjaga keamanan energi melalui promosi penggunaan energi terbarukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori geopolitik energi untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Malta mudah mendapatkan harga minyak lebih murah yang ditinjau dari geografi dan politik negara. Kemudian peneliti juga melihat politik domestik Malta untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Malta dalam mengambil kebijakan luar negerinya. Dengan demikian dapat diketahui jawaban atas keputusan pemerintah Malta yang tetap bergantung pada impor minyak yakni mudahnya Malta memperoleh minyak dengan harga murah dan ia mendapat pengaruh dari para MNC untuk terus mengeksploitasi sumber minyak.

Kata Kunci : Malta, EU Directive, Impor Minyak, MNC, Geopolitik Energi

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan *Renewable Energi Directive 2009/28/EC* (RED) dalam usahanya untuk menjaga keamanan energi melalui promosi penggunaan energi terbarukan yang ditujukan kepada negara anggota EU. Malta bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2004, dan sejak saat itu ia banyak mendapat Arahan Uni Eropa atau *EU Directive*¹ yang masuk berkaitan dengan kebijakan energi dan lingkungan (europa.eu, tt). Untuk menunjang kebutuhan energinya, Malta sepenuhnya bergantung pada impor minyak fosil. Hampir 100% energi minyak Malta didapatkan dari impor negara lain (EC, 2007). Akibat ketergantungan Malta terhadap energi fosil tersebut, EU meminta Malta mengurangi impor minyak karena kebijakan nasionalnya berlawanan dengan kebijakan EU yang berambisi menjaga keamanan energi dan lingkungan. Bagi EU sudah saatnya negara di dunia memperhatikan keamanan energi dan lingkungan paska Perang Dingin. Pentingnya

¹*EU Directive* ialah aturan yang dibuat oleh Legislati EU yang ditujukan kepada negara anggota dan bersifat secara sah karena memiliki kekuatan hukum yang kuat. *EU Directive* hanya menetapkan kerangka implementasi yang mana langkah selanjutnya diserahkan kepada negara anggota untuk dilaksanakan secara praktisnya (European Commission, tt).

menjaga keamanan energi dan lingkungan oleh EU direalisasikan melalui kebijakan *Renewable Energy Directive of the European Union* (EU-RED). EU RED menetapkan target yang harus dicapai oleh negara anggota hingga tahun 2020 dengan ketentuan 20% pemakaian sektor energi terbarukan dan 10% untuk pemakaian di sektor transportasi (EC, 2007).

Sesuai dalam Perjanjian Lisbon, bahwa terbentuknya kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dampak dari penggunaan energi berbahan bakar fosil yang mempengaruhi perubahan iklim global. Sehingga RED akan mengatur tentang penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, gas rumah kaca (GHG), energi listrik, pemancar alat pemanas/pendingin, dan transportasi (EC, tt). Permasalahan muncul ketika Malta melewati tenggat waktu menyerahkan *progress report*² kepada Komisi Eropa (Brussels, 2010). Menurut RED, Malta memiliki waktu hingga 30 Juni 2010 untuk dipresentasikan kepada Komisi awal tahun 2011. Target nasional Malta telah ditetapkan hanya 10 persen, terendah dari 27 negara anggota lain. Diketahui Malta harus mencapai target di tahun 2011 sebesar 2%, kemudian naik menjadi 3% hingga mencapai 10% pada tahun 2020.

Demi tercapainya target energi terbarukan, diperlukan dukungan baik dari EU maupun dari pemerintah Malta itu sendiri. Terutama dari segi bantuan dana sangat diperlukan agar mengundang investasi masuk di sektor energi terbarukan. Langkah Malta dalam menekan pada sektor investasi mendapat dukungan dari pemerintah EU. EU memberikan bantuan dana melalui skema hibah pertama, yang sebagian dibiayai oleh ERDF untuk mendukung penyebaran PV³ (Breuer and Pilla, 2014). Berbagai macam subsidi dan pemotongan pajak juga telah difungsikan untuk menarik investor asing. Selain itu, negara anggota EU lain yang telah mengimplementasikan skema insentif seperti jaminan *feed in tariff*⁴ (FiT) per kwh dari produksi energi dapat diaplikasikan ke berbagai negara.

Akan tetapi, meskipun Malta telah menjalankan kebijakan nasional energi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, faktanya Malta masih belum mampu mencapai target energi terbarukan. Berbeda dengan negara anggota EU lain dimana mereka mampu melampaui jumlah target yang diminta. Pada data yang menunjukkan hasil target Ist

²Dalam RED, sudah menjadi kewajiban negara anggota untuk mengirimkan draft laporan action plan kepada Komisi Eropa diawali pada tanggal 30 Juni 2010 mengenai perkembangan energi terbarukan setiap dua tahun sekali (EC, tt).

³PV = Photovoltaic, sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik.

⁴Merupakan kebijakan pembayaran kepada pengguna energi listrik yang dihasilkan dari penggunaan energi PV untuk menghasilkan "green electricity" mereka sendiri (fittariffs.co.uk, tt).

interim (sementara) tahun 2014 dan 2015, tercatat varian negatif terburuk Malta sebesar -0,7% ditahun 2014. Sedangkan target yang ditetapkan untuk Malta di bawah RED tahun 2014 adalah 5,4%. Dalam laporan sementara atau *Ist interim* terlihat Malta hanya mampu mencapai *renewable energy* sebesar 4,7%. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Malta masih jauh dari tujuan target utamanya.

Akan tetapi, persoalan Malta tidak hanya kapasitas energi terbarukan dan teknologi saja. Melainkan keputusan pemerintah Malta yang masih melakukan impor minyak fosil dalam jumlah yang tinggi. Masalahnya ialah Malta merupakan satu-satunya negara anggota EU yang sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil hingga mencapai 100% jumlah impor minyaknya. Pada kurun waktu sepuluh tahun dari 2006 hingga 2016, lebih dari 100% energi minyak fosil diimpor oleh Malta. Ketergantungan pada impor minyak yang digunakan untuk produksi sektor transportasi dan listrik dapat membuat Malta rentan terhadap ketidakstabilan harga minyak (Antoine, et al, 2008). Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan bakar fosil berupa emisi gas rumah kaca (GHG), keamanan energi dan isu lingkungan. Dikhawatirkan sikap pemerintah Malta yang terus mengimpor minyak dengan jumlah yang tinggi akan menjadi *boomerang* bagi negara tersebut. Beberapa destinasi negara pengekspor minyak terbesar ke Malta antara lain Rusia, Italia, UK, Libya, Azerbaijan, Israel, dan Turki (OEC, 2013).

Keterlibatan Malta Dalam Implementasi Kerangka *EU Directive 2009/28/EC*

Kebijakan energi pemerintah Malta memprioritaskan tujuan dan pembangunan di sektor energi terbagi pada tiga aspek, yakni keamanan persediaan energi, perlindungan lingkungan, dan daya saing. Ketiganya dirangkum kedalam NREAP yang meliputi tujuan utama kebijakan energi Malta, yaitu (a) Peningkatan efisiensi energi dan pengurangan sumber energi tradisional; (b) Meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi; (c) Pengurangan emisi gas rumah kaca; (d) Pengurangan dalam pola penggunaan energi; dan (e) Kurang keandalan pada sumber energi tradisional dan pada penyediaan energi asing. (Breuer and Pilla, 2014).

Perihal aturan *EU Directive*, Malta menyajikan data penyebaran RES terendah kedua setelah Luksemburg. Di bawah kebijakan energi *EU Directive*, Malta berkomitmen untuk mencapai target mengikat keseluruhan 10 persen dari sumber energi terbarukan pada tahun 2020.

Kerangka kebijakan ini telah didistribusikan pada EU-27 sesuai dengan prinsip kebijakan nasional masing-masing negara.

Tabel 1. Target Nasional Energi Terbarukan Negara Anggota EU

Nomor	Negara	Pencapaian Target Tahun 2005	Target di Tahun 2010	Target di Tahun 2020
1	Austria	23,3%	25,4%	34%
2	Belgia	2,2%	4,4%	13%
3	Bulgaria	9,4%	10,7%	16%
4	Siprus	2,9%	4,9%	13%
5	Republik Ceko	6,1%	7,5%	13%
6	Denmark	17,0%	19,6%	30%
7	Estonia	18,0%	19,4%	25%
8	Finlandia	28,5%	30,4%	38%
9	Prancis	10,3%	12,8%	23%
10	Jerman	5,8%	8,2%	18%
11	Yunani	6,9%	9,1%	18%
12	Hongaria	4,3%	6%	13%
13	Irlandia	3,1%	5,7%	16%
14	Italia	5,2%	7,6%	17%
15	Latvia	32,6%	34,1%	40%
16	Lituania	15,0%	16,6%	23%
17	Luksemburg	0,9%	2,9%	11%
18	Malta	0,0%	2%	10%
19	Belanda	2,4%	4,7%	14%
20	Polandia	7,2%	8,8%	15%
21	Portugal	20,5%	22,6%	31%
22	Rumania	17,8%	19%	24%
23	Slovakia	6,7%	8,2%	14%
24	Slovenia	16,0%	17,8%	25%
25	Spanyol	8,7%	11%	20%
26	Swedia	39,8%	41,6%	49%
27	Britania Raya	1,3%	4%	15%

Sumber: European Commission, tt

Target Malta yang mencapai 10 persen ditetapkan dalam Lampiran 1 *Directive 2009/28/EC* yang mengacu pada target nasional. Sehingga akan sulit bagi Malta untuk melakukan negosiasi ulang kepada EU karena Komisi Eropa sendiri telah menentang usulan atau kemungkinan Malta mengajukan protes. Di dalam isi dokumen tersebut dijabarkan definisi

sumber energi terbarukan ialah energi yang didapatkan dari sumber non fosil dan dapat diperbarui, yakni angin, matahari, panas bumi, hidrotermal, laut, tenaga air, biomassa, dan biogas (EC, tt). Sejauh pemanfaatan energi terbarukan di kepulauan Malta, ada kemungkinan sumber energi tenaga surya dan angin menjadi sumber energi paling layak. Prospek tenaga surya Malta terlihat bagus dengan tingkat *insolation*⁵ tinggi dan akan lebih mudah jika dikembangkan oleh pasar pemanas PV.

Potensi energi terbarukan yang dapat digunakan negara Malta yaitu energi matahari, angin, biomass, dan biofuel. Total konsumsi energi terbarukan negara Malta tahun 2011 adalah mencapai 1,26 persen dengan rincian penggunaan listrik 0,18 persen; sumber energi panas 0,80 persen; transportasi (biofuel) 0,28 persen. Selama ini Malta telah menerapkan skema insentif *Feed in Tariff* untuk pemasangan PV di atas gedung dan atap rumah penduduk.

MEEREA mencatat bahwa listrik yang dihasilkan Malta dari bahan bakar fosil mengalami penurunan pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Akan tetapi, impor bahan bakar fosil meningkat 0,3% pada tahun 2014 dibandingkan bahwa pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi. Berdasarkan Siaran Berita NSO, bahwa energi terbarukan Malta yang hanya mencapai 3,4% dari total energi finalnya digunakan untuk bahan bakar transportasi, penerbangan, pemanasan dan dikonsumsi dalam industri serta pengolahan limbah (nso.gov.mt, 2010). Oleh karena itu, selama dua tahun terakhir antara tahun 2014-2015 pencapaian rata-rata target Malta berada dibawah 5%.

Uni Eropa membangun jaringan transportasi Trans-Eropa yang efisien (TEN-T)⁶ yang dibentuk untuk mendukung energi terbarukan 2020. Dibangunnya jaringan transportasi Trans Erops (TEN-T) agar meningkatkan daya saing dan pekerjaan baru di Eropa (ec.europa.eu, tt). Pendanaan Uni Eropa untuk setiap proyek disediakan oleh *Connecting Europe Facility* (CEF), dengan negara-negara anggota yang relevan berkewajiban untuk menyelaraskan kebijakan investasi infrastruktur nasional dengan prioritas Eropa (ec.europa.eu, tt). Melalui

⁵ *Insolation = Incoming Solar Radiation*, radiasi matahari yang diterima permukaan bumi, bentuk energi matahari berupa gelombang pendek yang oleh permukaan bumi diemisikan kembali dalam bentuk radiasi gelombang panjang.

⁶ Trans-European Transport Network (TEN-T) merupakan kebijakan Komisi Eropa yang diarahkan pada implementasi dan pengembangan jaringan jalan, jalur kereta api, perairan pedalaman Eropa, rute pengiriman maritim, pelabuhan, bandara dan terminal kereta.

sejumlah tindakan yang sedang dilakukan untuk mempromosikan pengurangan dampak akibat perubahan iklim.

Sehingga, untuk menyukseskan pengembangan kebijakan energi di Malta diperlukan dorongan atau bantuan dari EU selaku institusi internasional. Skema pengembangan RES Malta yang diberikan oleh EU melalui pemberian dana ERDF memberikan bantuan keuangan untuk menutupi sebagian biaya peralatan RES yang digunakan di sektor domestik (pemanas air tenaga surya dan panel fotovoltaik). Dana yang tersedia telah dialokasikan sesuai dengan jenis peralatan yang dibeli. Biaya Proyek yang disediakan untuk Malta mencapai € 14.573.886 dan diterima oleh Pengatur Layanan Energi dan Air (*Regulator for Energy and Water Services*) Malta (investinyourfuture.gov.mt, tt). Selama jangka waktu yang digunakan dalam pemberian dana yang dimulai tahun 2008 hingga 2015, telah menghasilkan total listrik tahunan dari penginstalan PV perumahan sebesar 13.833 MWH/tahun untuk Malta dan 7.511,84 MWH/tahun untuk Gozo. Sebesar 1.420 m² Pemanas Air Tenaga Surya dipasang (investinyourfuture.gov.mt, tt).

Meski demikian, selama kurun waktu tujuh tahun skema ini diterapkan, pemerintah cenderung berfokus pada penginstalan PV yang memakan banyak biaya. Terlebih dana yang diberikan ERDF sangat sedikit untuk jangka waktu yang lama. Peran utama dana Uni Eropa dalam mendukung efisiensi energi dan sumber energi terbarukan (RES) ialah supaya menghargai manfaat sumber daya yang dimiliki jika dibandingkan dengan sumber daya konvensional. Peran lain ialah mengatasi hambatan-hambatan yang cenderung dihadapi para investor (seperti rumah tangga, perusahaan, organisasi sukarela dan lembaga publik) dalam bentuk

Belum lama ini, pemerintah Malta mengumumkan pemberian insentif baru untuk industri energi terbarukan yang terdiri dari pembayaran 140 juta euro kepada perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Kebijakan ini akan membantu para produsen untuk lebih kompetitif dan menawarkan solusi yang lebih baik dan lebih murah bagi mereka yang tertarik menggunakan energi terbarukan. Kebijakan ini telah disetujui oleh Kamar Dagang (*Chamber of Commerce*) dan Komisi Eropa bahwa perusahaan-perusahaan di industri ini memerlukan dukungan keuangan untuk berkembang (lawyersmalta.eu, 2016). Skema pemerintah terdiri dari pemberian bantuan keuangan kepada perusahaan Malta yang memproduksi panel fotovoltaik dalam bentuk pembayaran premium. Program ini akan dijalankan hingga 2020

dan juga akan mencakup ladang angin di Malta. Selain meningkatkan daya saing, program ini juga diharapkan dapat mendorong investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehingga dari sini dapat dipahami arah kebijakan Malta yang masih berjuang menemukan investor baru untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Disamping faktor tingkat ekspor impor Malta berada digaris negatif, keberadaan perusahaan energi Enemalta juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola energi di masyarakat. Sehingga ketika terjadi ketidakstabilan pada badan perusahaan akan berpengaruh pada kestabilan harga listrik di negara Malta. Oleh sebab itu, pengembangan infrastruktur untuk energi terbarukan masih mengalami kendala sehingga pemerintah belum membangun infrastruktur maupun teknologi secara insentif.

Posisi Malta Dalam Geopolitik Energi Di Kawasan Mediterania

Secara geografis, Malta berada di posisi yang baik karena minyak dapat dikirim relatif mudah ke pelabuhan terdekat. Namun, adanya ketegangan disekitar kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi masalah geopolitik bagi kelangsungan pasokan minyak Malta. Pasalnya Malta lebih sering melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dibandingkan dengan negara-negara Eropa itu sendiri. Dibuktikan dengan banyaknya kerjasama bilateral di kawasan Mediterania. Terlebih negara-negara di kedua kawasan tersebut penyuplai minyak terbesar bagi Malta. Dengan lokasi yang lebih dekat dari Malta lebih memudahkannya untuk mengimpor minyak dari negara-negara tersebut.

Pada tahun 2015, Malta dan Italia secara informal setuju untuk memberlakukan moratorium kegiatan eksploitasi minyak di daerah lepas pantai Sisilia dan Malta. Hubungan antara pembentukan harga energi dan geopolitik telah saling berkaitan sejak awal abad kedua puluh. Tindakan politik negara-negara penghasil energi seperti Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Amerika Serikat berdampak pada harga energi. Sebaliknya, harga energi mempengaruhi tindakan geopolitik negara-negara penghasil energi serta konsumen global seperti Cina dan India. Fluktuasi di sektor energi ini membentuk hubungan antara geopolitik dan investasi. Pemahaman pragmatis dari dua komponen yang terpisah ini sangat penting untuk menavigasi keamanan nasional dan memahami pasar keuangan yang terkait dengan bahan bakar fosil. Ditambah dengan pemahaman geopolitik sangat penting untuk membuat investasi minyak dan gas yang menguntungkan.

Sebagai negara kepulauan, Malta dan Gozo membutuhkan sarana konektivitas baik di dalam domestik maupun luar domestik dengan negara-negara Eropa lainnya. Karena pada dasarnya Malta sangat bergantung pada transportasi dan angkutan yang melalui jalur laut. Oleh karena itu, investasi dalam perbaikan infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan Malta tidak semakin terisolasi dan mengakibatkan kehilangan keuntungan ekonomi. Karena alasan ini, infrastruktur pelabuhan diperlukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terutama perdagangan internasional. Pemerintah sedang berusaha untuk menarik investor dan membangun lebih banyak bisnis ke Gozo agar meningkatkan aktivitas antara kedua pulau.

Hubungan luar negeri Malta dengan negara-negara di Mediterania terlihat pada terbentuknya Program Kerjasama Wilayah Eropa 2007-2013. Program ini bertujuan untuk mendorong kerja sama di Eropa serta bertukar pengetahuan di seluruh negara anggota dan kawasan. Program-program ini didanai oleh Dana Pembangunan Regional Eropa (ERDF) di bawah Kebijakan Kohesi 2007-2013 (eufunds.gov.mt, tt). Beberapa program kerjasama yang diikuti Malta diantaranya: a.) *The Italia-Malta Programme*, b.) *The Med Programme*, c.) *ENPI CBC Med Programme* (eufunds.gov.mt, tt).

The Italia-Malta Programme merupakan Program Kerjasama Lintas Batas yang mendorong kerja sama sosial-ekonomi dan budaya yang melintasi perbatasan laut antara Malta dan Sisilia (italiamalta.eu, tt). Program kerjasama ini didasarkan pada sumber daya potensial dari wilayah lintas batasyang dapat dievaluasi lebih lanjut (italiamalta.eu, tt). *The Med Programme* adalah Program Kerjasama Transnasional yang mempromosikan kerja sama antara wilayah Mediterania yang tergabung sebagai negara anggota EU yaitu: Siprus, Spanyol, Prancis, Yunani, Italia, Malta, Portugal, Inggris (Gibraltar), Slovenia, serta dua negara kandidat Kroasia dan Montenegro. Program ini berfokus pada penguatan daya saing serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan, lapangan kerja, kohesi teritorial dan perlindungan lingkungan (programmemed.eu, 2013). *ENPI CBC Med Programme* merupakan Program Kerjasama Lintas Batas multilateral yang didanai di bawah *European Neighbourhood and Partnership Instrument*. Tujuan dari Program ini adalah untuk memperkuat kerja sama antara Uni Eropa dan negara-negara mitra di sepanjang pantai Laut Mediterania. Empat belas negara yang berpartisipasi mewakili program kerjasama ini. Diantaranya Siprus, Mesir, Prancis, Yunani, Israel, Italia, Yordania, Libanon, Malta, Otoritas Palestina, Portugal, Spanyol, Suriah dan Tunisia (enpicbmed.eu, 2012).

Dari berbagai bentuk kerjasama tersebut, terlihat Malta lebih aktif dalam kegiatan kawasan Mediterania. Bahkan Malta sendiri lebih banyak melakukan hubungan bilateral dengan negara Libya dan Italia. Jika dilihat melalui teori geopolitik energi terlihat sangat jelas jika hubungan bilateral antara Malta dengan kedua negara tersebut dipengaruhi oleh garis batas negara (*cross border*) dimana posisi Malta berada diantara kedua negara tersebut. Sedangkan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA)⁷ lebih dekat dengan Malta dari segi jarak dan hubungan negara. Karena sebelum Malta bergabung dengan EU tahun 2004, Malta lebih dulu memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan tersebut. Dapat dikatakan jika negara-negara yang berada di kawasan MENA memiliki pasokan sumber energi yang selama ini menjadi energi primer oleh Malta.

Harga minyak di dunia sangat ini sulit diduga, beberapa waktu lalu *Department Commodity Strategy RBC Capital and Global Markets*⁸, mengungkapkan ada tiga skenario dalam dinamika perubahan harga minyak (rbccm.com, 2016). Pertama skenario cadangan minyak, jika terjadi pengurangan cadangan minyak yang mencapai satu juta barel akan diperkirakan memacu harga minyak hingga kisaran US\$ 60 per barel. Skenario kedua keterlibatan produksi secara masif dari negara-negara penghasil minyak (anggota OPEC) yaitu Arab Saudi, Iran, dan Libya di pasar minyak dunia. Akibatnya terjadi ledakan harga minyak secara tajam yang merapat pada level US\$ 20 per barel. Skenario ketiga terciptanya keseimbangan pasar minyak dunia pada tahun 2016 (rbccm.com, 2016).

Laporan internasional menunjukkan harga bahan bakar ritel Malta termasuk yang paling tinggi pajaknya diantara pajak minyak di Eropa, bahkan di seluruh dunia (timesofmalta, tt). Harga bahan bakar bensin di Malta per 2010 mencapai 163 sen AS per barel. Dari 170 negara, Malta menduduki urutan ke-35 negara dengan harga minyak termahal. Di kawasan Eropa sendiri, Malta menduduki posisi ketiga sebagai negara termahal setelah Turki dan Belanda (timesofmalta, tt). Pemerintah Malta sendiri juga membenarkan bahwa bahan bakar

⁷MENA = Middle East & North Africa, mencakup 22 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara dimana menyumbang 60% cadangan minyak dunia dan 45% cadangan gas alam dunia. Negara-negara yang termasuk dalam MENA: Aljazair, Bahrain, Djibouti, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Libanon, Libya, Malta, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Yaman. Ethiopia dan Sudan terkadang disertakan. ¹² diantaranya merupakan negara anggota OPEC.

⁸RBC Capital Markets adalah pembentuk pasar energi yang mendalami minyak dan gas alam, menyediakan likuiditas dan solusi manajemen terhadap risiko yang disesuaikan. RBC adalah pemberi pinjaman utama bagi klien korporat di sektor energi Amerika Utara dan memiliki hubungan yang signifikan dengan sebagian besar produk E&P senior dan menengah. RBC menawarkan spektrum penuh solusi lindung nilai finansial - termasuk harga tetap, opsi standar, dan struktur untuk produsen dan konsumen minyak mentah (rbccm.com, 2012).

Malta berasal dari impor yang mana membuat harga jual ecer bahan bakar di Malta tergolong tinggi. Karena kenaikan harga minyak di Malta sendiri juga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar di luar negeri. Ditambah biaya pengiriman yang diangkut melalui kapal semakin menambah harga minyak Malta semakin mahal. Rata-rata harga bensin di Malta tanpa timbal € 1,31 per liter dan solar €1,21 per liter.

Meskipun harga minyak di Malta sangat tinggi, rupanya tidak menyurutkan kebijakannya untuk tetap mengimpor minyak yang besar. Terbukti dengan data statistik yang memperlihatkan jumlah impor minyak melebihi angka seratus persen. Enemalta Plc selaku perusahaan produksi listrik negara memiliki wewenang untuk memutuskan jumlah impor minyak. Berdasarkan laporan tahunan diketahui bahwa keputusan Enemalta untuk menambah jumlah impor minyak disebabkan jumlah permintaan atau *demand* masyarakat sangat tinggi. Oleh karena itu, dipenuhinya permintaan dalam negeri agar proses produksi berjalan lancar. Dari penjelasan tersebut, bahwa tingginya harga minyak di Malta disebabkan oleh tiga faktor, pertama kestabilan perpolitikan negara penghasil minyak yakni negara-negara OPEC, kedua tingginya harga pengiriman minyak melalui kapal, dan terakhir tingginya jumlah permintaan dari dalam negeri.

Keterlibatan Perusahaan Minyak *Malta Oil & Gas* (MOG) Dalam Eksploitasi Sumber

Energi Minyak Baru Di Malta

Keberadaan aktor non negara seperti MNC di Malta sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan. Terlebih Malta adalah negara kecil yang pengaruhnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan negara disekitarnya. MNC di Malta seperti *MOG, Heritage Oil Limited*, dan masih banyak lagi sangat diperhitungkan peranannya oleh pemerintah. Keberadaan para perusahaan minyak yang membawa kepentingan pengeboran sumur minyak baru di areal-areal Malta menurut analisa peneliti ditanggapi positif oleh pemerintah Malta. Justru pemerintah Malta dengan tangan terbuka menerima kepentingan para MNC ini untuk mengeksploitasi sumber energi baru. Harapan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak adalah sama-sama agar Malta memiliki cadangan pasokan minyak sendiri sehingga tidak perlu melakukan impor dalam jumlah besar. Dari analisis peneliti, proyek pengeboran minyak dapat memberikan keuntungan untuk berbagai pihak:

1. Bagi pemerintah Malta, tidak akan menggantungkan pasokan minyaknya pada negara lain yang otomatis akan mengurangi jumlah import minyaknya. Hal ini sesuai dengan aturan dalam *EU Directive* bahwa setiap negara anggota EU harus mengurangi penggunaan energi minyak salah satu caranya yakni mengurangi jumlah impornya.
2. Bagi MNC, ketersediaan pasokan minyak menguntungkan MNC karena mereka akan menjadi *supply* energi minyak tanpa harus impor dulu dari negara penyuplai minyak.
3. Bagi masyarakat Malta, konsumsi energi akan terus terjamin dengan tersedianya pasokan minyak di negara tersebut dengan harga yang lebih murah. Terlebih harga listrik karena selama ini harga listrik di Malta masih tinggi meskipun telah disubsidi melalui skema *feed in tariff* dan subsidi dari pemerintah Malta.

Selama ini kebijakan Malta yang sepenuhnya mengimpor minyak dalam jumlah tinggi dipengaruhi juga oleh keberadaan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Pasalnya negara-negara di kawasan tersebut kebanyakan merupakan *supply* minyak dan membutuhkan pangsa pasar yang tetap. Eropa menjadi pangsa pasar energi terbesar mengingat konsumsi di benua ini sangat tinggi. Terlebih Malta yang berada di antara Eropa, Afrika, dan Asia sehingga kondisi tersebut sangat dimanfaatkan Malta untuk memperoleh keuntungan. Mengingat sejak Perang Dunia Pertama, minyak telah menjadi komoditas penting dalam geopolitik energi global. Pergeseran pasokan dari batubara ke pasokan minyak telah menyebabkan negara penghasil minyak menjadi pusat geopolitik global dan menjadi masalah utama bagi keamanan nasional.

MOG dalam negosiasi lanjutannya dengan pihak ketiga berupaya untuk mengeluarkan 75 persen hak kerja yang dimiliki anak perusahaan, *Phoenicia Energy Limited*. Sedangkan pemerintah Malta menyepakati untuk perpanjangan PSC dengan syarat yang meliputi: (a.) Tidak ada perubahan dalam pengeluaran eksploitasi minimum (US\$ 5 juta), (b.) Komitmen untuk memperoleh 1.000 km² seismic 3D pada Januari 2012, (c.) Denda pengeboran sebesar US\$ 5 juta berlaku untuk pemegang hak kerja dengan tanggal kadaluwarsa pada tanggal 18 Januari 2013. Dengan catatan kecuali ada pembenaran teknis yang tidak harus mengebor sumur tersebut, (d.) Pembayaran bonus untuk perpanjangan sebesar US\$ 300.000 pada bulan Juli 2011 (offshoreenergytoday.com, 2011).

Keamanan energi memiliki makna yang berbeda di setiap negara (Muller & Kraener, 2007). Bagi negara importer seperti Malta, dapat dipahami sebagai langkah-langkah kebijakan yang diambil terhadap kemungkinan resiko gangguan impor energi yang menyebabkan hilangnya

kesejahteraan ekonomi. Meskipun pemerintah mendefinisikan keamanan energi sebagai bentuk yang menggantungkan pada kegiatan impor, pemerintah mengimpor untuk meningkatkan keamanan energi negaranya sendiri dengan memastikan pasokan energi yang dapat diandalkan dengan harga yang wajar untuk mendukung ekonomi dan industri (Dorian, et al, 2006). Tidak mengherankan ketika konsep keamanan energi oleh para ahli dipersempit pada pembahasan minyak. Minyak menjadi kunci penting dalam serangkaian keamanan energi, bagi negara pengimpor energi khususnya, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang keamanan impor minyak yang mendominasi pemikiran kebijakan.

Langkah-langkah yang paling umum digunakan oleh importir minyak untuk meningkatkan keamanan energi antara lain: 1.) mendiversifikasi sumber impor minyak, 2.) mendiversifikasi jenis bahan bakar yang digunakan, 3.) mendiversifikasi rute transportasi, 4.) mengamankan akses energi pada sumber, 5.) energi konservasi, efisiensi energi, inovasi teknologi, penimbunan, peningkatan produksi dalam negeri, 6.) peningkatan kerja sama internasional di antara importir, 7.) peningkatan hubungan politik dengan eksportir, 8.) dan menjaga hubungan dekat dengan atau kontrol perusahaan minyak yang berbasis di negara pengimpor (Vivoda, 2010). Mengingat bahwa keamanan energi memiliki arti yang berbeda untuk negara yang berbeda, sehingga negara akan ketergantungan pada perusahaan minyak internasional (IOC) atau perusahaan minyak nasional (NOC) (Vivoda, 2010).

Hubungan antara MNC dan *home country* memiliki atribut dan tujuan yang berbeda dalam mencapai kepentingan. Keduanya memiliki rentang geopolitik yang berbeda dan peran beroperasi yang berbeda (Hamel, 1980). MNC dapat bertindak secara independen untuk mempengaruhi para aktor politik dan struktur politik di dalam pemerintah pusat dan internasional. MNC/IOC memainkan peran besar dalam ekonomi nasional di sebagian besar negara maju (Vivoda, 2010). Selama negara-negara tersebut mempertahankan pemerintahan yang representatif, kepentingan perusahaan-perusahaan itu kemungkinan besar akan mempengaruhi proses politik. Dalam hal ini, MNC dapat bergerak atas perintahnya sendiri dan berfungsi sebagai penggagas item agenda kebijakan.

Tentang hubungan antara Pemerintah Malta dan IOC memunculkan poin-poin yang menarik adalah efek dari investasi langsung asing pada tingkat pekerjaan domestik, pada kesehatan ekonomi negara (neraca pembayaran, inflasi, PDB) dan tentang kebijakan pajak. Bukan pada hubungan IOC dengan kebijakan luar negeri dan keamanan energi Malta. Karena seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa minimnya investasi asing pada eksploitasi minyak baru

Malta menyebabkan tertundanya pengeboran sumur lanjutan. Terbangkalainya proyek pengeboran sumur menjadikan Malta terus mengandalkan impor minyak untuk mengamankan pasokan energinya.

Dibawah kepemimpinan PM Muscat yang berasal dari Partai Buruh Malta mendukung sepenuhnya kebijakan *sustainability development* oleh EU terkait kebijakan *EU Directive* yang selama ini secara aktif dikembangkan di setiap aturan tentang penerapan energi terbarukan. Hal ini diungkapkan dalam pidato PM Muscat:

“Malta’s Commitment to the shift to a green economy is expressed in my Government’s programme of work, through the implementation of a strategy based on best practices that put the environment at the core of decision made while aiming to achieve economic growth that gives due consideration to sustainable development”.

– Prime Minister Dr. Muscat (Eco Forum Global Conference, Guiyang, 2014).

Malta sepenuhnya setuju untuk mengadopsi kebijakan yang menyangkut keberlangsungan lingkungan dan juga ekonomi negara. Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi turut dipengaruhi pula oleh sumber daya alam yang mana sumber daya alam di Malta sendiri sangat terbatas. Dari pidato tersebut sangat jelas maksud dari pemerintah yang ingin membawa perubahan bagi Malta yang selama ini mengabaikan lingkungan terutama keberadaan energi. Selama ini Malta terus menggantungkan sumber energinya yaitu minyak dari impor negara lain dan bergantung sepenuhnya pada minyak tersebut. Hanya dengan keberadaan minyak dapat menggerakkan ekonomi dengan terus meningkatkan produksinya.

Keterlibatan individu maupun lembaga eksekutif pemerintah memiliki kontribusi yang besar dalam proses penyusunan politik luar negeri. Dalam proses penyusunan politik luar negeri Malta dapat dilihat lembaga eksekutif pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri dengan kekuatan paling tinggi untuk mengambil keputusan. PM Malta saat ini (era 2013-sekarang) Dr Joseph Muscat berasal dari Partai Buruh memiliki kekuatan tertinggi dalam memutuskan suatu kebijakan. Dalam acara peluncuran proposal Partai Buruh bahwa negara Malta akan diarahkan sebagai bangsa yang maju dalam industri perbisnisan (maltachamber.org.mt, 2017). Dalam pidatonya di konferensi pers tersebut, Dr Muscat mengatakan jika pemerintahan Partai Buruh akan memastikan Bank Pembangunan Nasional (NDB) mengalokasikan dana untuk bank-bank komersial dalam rangka meningkatkan kegairahan

produsen dalam berbisnis di Malta. Karena selama ini masalah utama yang dihadapi Malta adalah rendahnya bisnis dan kurangnya akses kredit atau pinjaman yang disebabkan tekanan internasional. Dr Muscat mengatakan selama wawancara bersama Radio One:

“How can someone say he knows the way forward when there is no policy? Why did oil firm Totsa win nine of 11 tenders even when it was not always the cheapest bidder? How were bids accessed before the Malta Information Technology Agency, which fell under (former minister) Austin Gatt’s reign, provided the password? The police should delve deeper into the scandal because I am sure that there is much more to it.”.

Merujuk dari pernyataan Dr Muscat yang mengatakan bahwa pemerintahan Malta di era sebelum tahun 2011 tidak memiliki kebijakan yang jelas terhadap undang-undang energi terutama minyak. Mengacu pada pendapat Komite Akun Publik (PAC) pada laporan *Auditor General* tentang pengadaan minyak, Dr Muscat mengatakan bahwa sejauh ini telah terjadi kekacauan dalam pembelian minyak di bawah pemerintahan sebelumnya. Dia mengakui bahwa negara ini Malta tidak memiliki kebijakan pengadaan minyak sebelum 2011 (Xuereb, 2013). Terkait dengan masalah minyak, Dr Muscat berbicara tentang nota kesepahaman (MoU) yang dikerjakan bersama Libya. Ia mengatakan jika pemerintah sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan eksploitasi bersama Libya dan Italia di area yang selama ini menjadi permasalahan sengketa selama beberapa tahun. Pada perjanjian dengan Libya untuk pengadaan minyak, Dr Muscat mengatakan bahwa kesepakatan awal ini mencakup minyak, bahan bakar dan LPG. Perjanjian tersebut termasuk ketentuan untuk pengadaan minyak mentah dan minyak sulingan. Perjanjian tersebut akan mulai berlaku segera setelah Libya mampu menghasilkan minyak yang cukup diproduksi (timesofmalta.com, 2013).

Mengenai kasus perusahaan energi domestik yakni Enemalta, Dr Muscat mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan perusahaan dan karyawannya. Pemerintahan sebelumnya bahkan belum membayar satu sen pun pada pembangkit listrik Delimara. Hutang Enemalta telah melebihi € 800 juta, dan ia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menghentikan penggunaan bahan bakar minyak berat di pembangkit listrik. Selama dekade terakhir ini, kebijakan luar negeri Malta yang awalnya difokuskan pada Brussels namun sekarang Malta memfokuskan kembali pada agenda internasionalnya karena kebijakan Uni Eropa bukan kebijakan luar negeri paling utamanya menurut Dr Muscat (Xuereb, 2013).

Kesimpulan

Peralihan dari penggunaan energi konvensional ke energi terbarukan cukup menarik bagi negara yang sangat *concern* pada keamanan energi dan lingkungan. Pemerintah membentuk undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kebijakan energi terbarukan sebagai bentuk keseriusan negara dalam mengatasi persoalan energi. Motif yang dipakai tidak selalu tentang ekonomi karena hal utama yang mendasari pemerintah Malta adalah keinginan untuk melindungi lingkungan yang mana telah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Kebijakan energi terbarukan atau *EU Directive* di Malta pada dasarnya telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah setempat. Namun karena pemerintah hanya fokus pada pengembangan penginstalan PV di area-area atap gedung menyebabkan pemerintah mengabaikan sektor lain yang juga potensial.

Hambatan Malta mencapai target energi terbarukan periode *1st interim* tahun 2014 disebabkan oleh tiga faktor: A) Faktor pertama, jalur perdagangan minyak sebagai akses untuk mendapatkan harga minyak menjadi lebih murah. Jalur yang melewati Laut Mediterania sehingga lokasi Malta yang berada di tengahnya mendapat keuntungan secara strategis yakni memperoleh harga minyak lebih murah terbukti adanya. B) Faktor kedua, tidak tercapainya kesepakatan antara pemerintah Malta dengan MNC untuk mengeksplorasi sumber minyak baru. Sehingga terjadi penghentian proyek sejak tiga dekade lalu dan baru dimulai kembali bentuk kerjasama pada tahun 2015 dan mulai beroperasi tahun 2017. C.) Terakhir faktor hubungan kerjasama internasional antara Malta dengan negara-negara penghasil minyak sangat kuat. Sehingga Malta banyak menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara penghasil minyak. Energi terbarukan bagi peneliti merupakan alternatif paling prospek untuk menanggulangi keamanan energi jika dikemudian hari persediaan energi minyak telah habis. Namun kembali pada keputusan negara dalam membuat kebijakan negaranya untuk tetap mengembangkan infrastruktur RE sebagai bentuk keseriusan dalam menggunakan energi terbarukan atau memilih menggunakan energi konvensional.

Daftar Pustaka

- tt. “*Environment Climate Change and Renewable Energy Source*”. Diakses pada tanggal 25 April 2019 melalui <https://investinyourfuture.gov.mt/project/environment-climate-change-and-renewable-energy-sources/promotion-of-renewable-energy-sources-in-the-domestic-sector-33947676> [Web].
- tt. “*What is the Feed in Tariff: FIT and How Does It Work*”. Igenergy. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 melalui <https://www.lgenergy.com.au/faq/solar-power-explained/what-is-the-feed-in-tariff-fit-and-how-does-it-work> [Web].
- 2010. “*Malta Misses EU Deadline For Renewable Energy*”. Diakses pada tanggal 21 April 2019 melalui <https://www.timesofmalta.com/articles/view/20100702/local/malta-misses-eu-deadline-for-renewable-energy-plan.315788> [Web].
- 2003. “*Malta to be Linked to Libya Italy Gas Pipeline*”. Diakses pada tanggal 28 April 2019 melalui <https://www.timesofmalta.com/articles/view/20030525/local/malta-to-be-linked-to-libya-italy-gas-pipeline.1> [Web].
- 2013. “*Report From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions: Renewable energy progress report*”. Brussels. Diakses pada tanggal 25 Februari 2019 melalui <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-175-EN-F1-1.Pdf> [PDF]
- 2016. “*Economic Growth in Malta Continues to Impress*”. Diakses pada tanggal 12 Mei 2019 melalui <https://www.financemalta.org/publications/articles-interviews/articles-and-interviews-detail/economic-growth-in-malta-continues-to-impress-2016/> [Web]
- 2015. “*Governance Energy Union*”. Diakses pada tanggal 14 Mei 2019 melalui <http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/pp144governanceenergyunionjavinoisjdjongjdioc2015.pdf?pdf=ok> [Web]
- 2014. “*Programme Operative Italia Malta 2007-2013*”. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 melalui <http://www.italiamalta.eu/en/il-programma-operativo-italia-malta-2007-2013.html> [Web]
- 2016. “*Malta to Invest 140 million in Renewable Energy*”. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 melalui <https://www.lawyersmalta.eu/blog/2016/09/malta-to-invest-140-million-in-renewable-energy> [Web]
- tt. “*What Are EU Directives*”. King College London. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 melalui <https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/what-are-eu-directives/> [Web]

- EC. tt. “*Energy – Renewable Energy Directive*”. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019 melalui <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive> [Web]
- EC. 2007. “*Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007/C 306/01)*”. Lisbon. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019 melalui <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT> [PDF]
- EC. tt. “*Progress Report – Energy*”. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019 melalui <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports> [Web]
- EEA. 2013. “*Share of Renewable Energy Consumption in Transport*”. Copenhagen, Denmark. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 melalui <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/share-of-renewable-energy-consumption-1> [Web]
- EIA. tt. “*Renewable Energy Explained*”. Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 melalui https://www.eia.gov/energyexplained/?page=renewable_home [Web]
- Enemalta, tt. “*About Enemalta*”. Diakses pada tanggal 2 April 2019 melalui <https://www.enemalta.com.mt/> [Web]
- Europa.eu, tt. “*Legal Act: EU Directives*”. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 melalui https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en [Web]
- European Law Monitor, tt. “*EU Legislation – What is an EU Directive*”. Diakses pada tanggal 13 Maret 2019 melalui [Web] <https://www.europeanlawmonitor.org/what-is-guide-to-key-eu-terms/eu-legislation-what-is-an-eu-directive.html> [Web]
- Europa.eu, tt. “*Euro Mediterranean Region Signs Agreement regional Electricity Markets*”. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019 melalui <https://ec.europa.eu/energy/en/news/euro-mediterranean-region-signs-agreement-regional-electricity-markets> [Web]
- EU Funds, 2013. “*EU territorial Programme*”. Diakses pada tanggal 13 Mei melalui <https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/EU%20Territorial%20Programmes/Pages/Eu-Territorial-Programmes.aspx> [Web]
- EU Funds, 2013. “*Programme Italia Malta 2007-2013*”. Diakses pada tanggal 13 Mei 2019 melalui <https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/EU%20Territorial%20Programmes/Pages/Italia-Malta-2007-2013.aspx> [Web]
- IEA. 2010. “*National Renewable Energy Action Plan (NREAP)*”. Diakses pada tanggal 27 Februari 2019 melalui <https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/malta/name-40114-en.php> [Web]
- MOG, tt. “*About Malta Oil and Gas*”. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 melalui <http://www.maltaoilandgas.com/> [Web]
- NSO, 2010. “*Malta News Release*”. Diakses pada tanggal 17 April 2019 melalui [https://nso.gov.mt/en/News_Releases/Archived_News_Releases/Pages/2010/2010-1\].aspx](https://nso.gov.mt/en/News_Releases/Archived_News_Releases/Pages/2010/2010-1].aspx) [Web]

OECD, 2013. "*Import Malta on Oil*". Diakses pada tanggal 10 April 2019 melalui https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/import/mlt/show/2710/2013/ [Web].

OECD, 2012. "*Discussion on Limitations and Constraints to International Co-operation,*" Working Party Co-operation and Enforcement. [Web]